

KEPEMIMPINAN NASIONAL DAN PERAN MILITER DALAM PROSES DEMOKRATISASI

Riswandha Imawan*

Abstract

In response to a widespread pressure for political reform, the military has abandon its predominant role in Indonesian politics in the past. Yet the incompetence of civilian politician to govern a deep and extensive conflict embedded within the process of democratization, paradoxically, has driven the need for inviting a military "came back". While positively supporting the military attempt to be politically impartial, this article itemizes four agendas: (1) for recruiting national leaders which are, on the one hand, democratic, but on the other hand, decisive, (2) engaging in a trust-building process among various factions; (3) institutionalization of political mechanism which is effective in handling conflict of interests, and (4) creating a more open political recruitment. Under its new paradigm, the military suits to facilitate those processes to take place.

Kata-kata kunci: *demokratisasi, peran militer, kepemimpinan nasional.*

Tidak banyak warga negara Indonesia yang menyadari bahwa gerakan reformasi 1998 sebenarnya telah melepaskan pendulum kehidupan sosial-politik kita dari satu titik ekstrim ke titik ekstrim yang lain. Peran negara bergerak dari posisi superior ke posisi inferior,

* Guru Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, Yogyakarta.

yang ditandai dengan terjadinya demistifikasi simbol-simbol negara pada tataran masyarakat. Format sistem kepartaian berubah dari hegemonik ke *atomized*, yang ditandai dengan kelahiran 143 partai politik sebelum akhirnya diputuskan hanya ada 48 partai politik yang berhak mengikuti Pemilu 1999.¹ Konsep penyelenggaraan pemerintahan bergeser dari pemerintah sebagai inisator dan dinamisator kehidupan sosial ke arah sekedar menjadi fasilitator insiatif yang muncul dari masyarakat. Paradigma pembangunan juga bergeser dari *dependency-creating* ke arah *empowering*.

Urgensi Pemimpin Visioner dan Perubahan Peran Militer

Perubahan yang terjadi sebenarnya tidak sebatas pada praktek ketata-negaraan, juga berdampak pada kehidupan sosial yang menyeluruh. Dalam situasi seperti ini, kehadiran seorang pemimpin yang visioner, yang mampu menawarkan kepada masyarakat sebuah gambaran atau harapan tentang masa depan yang lebih baik, yang secara realistis bisa kita capai, sangat dibutuhkan. Kenyataannya, pemimpin berkualifikasi ini tidak juga muncul.

Sejalan dengan itu, gejolak politik di tanah air menunjukkan peningkatan suhu yang cukup mengkhawatirkan. Konflik antar elit melebar pada dimensi maupun keterlibatan aktor. Secara paradoksial melebarnya konflik ini diikuti dengan penurunan tataran dari institusi menjadi tataran pribadi. Masih kuatnya patronase dalam politik di Indonesia, membuat intensitas konflik meningkat. Saling tuduh menjatuhkan pamor sang patron yang menciptakan bentrokan fisik pada tataran akar rumput politik, membuahkan perasaan tidak aman di kalangan masyarakat. Awalnya, masyarakat tampak tidak peduli dengan pertentangan yang terjadi pada tataran elit. Namun akhir-akhir ini ada indikasi kuat bahwa masyarakat mulai jenuh dengan instabilitas sosial sebagai dampak pergolakan politik yang tak kunjung padam ini. Keresahan pada tingkat masyarakat meningkat, ketahanan sosial-ekonomi mereka menurun drastis, sementara rasa saling percaya antar warga masyarakat cenderung ambruk. Keadaan inilah yang

¹ Data diambil dari *Almanak Partai Politik Indonesia* (API), 1999.

memunculkan fenomena "kesediaan" masyarakat agar TNI, dalam batas tertentu, memainkan peran untuk menyelamatkan bangsa Indonesia. Dalam bahasa sehari-hari muncul aspirasi dari masyarakat agar TNI berperan "tapi jangan seperti dulu lagi." Peran itu sebatas membantu masyarakat menegakkan hukum dan tertib sosial, agar *civil society* dapat terbentuk secara sempurna.

Mengapa pandangan masyarakat terhadap TNI tampaknya mulai berubah dalam arti melunak? Diluar dugaan banyak orang, setelah hampir tiga tahun bergulir gerakan reformasi menghasilkan dua paradoks. Gerakan yang dijiwai semangat egalitarian akhir-akhir ini justru menunjukkan terjadinya jarak yang makin lebar antara elit (baca: pemimpin) dengan pengikut (rakyatnya).² Kita bangga dengan penilaian pengamat asing atas penyelenggaraan Pemilu 1999 yang dinilai paling demokratis selama tiga dekade terakhir. Kalau penilaian ini benar, maka sewajarnya tidak ada perbedaan skala prioritas kerja yang ada dalam agenda masyarakat maupun agenda pemerintah. Namun fenomena kemasyarakatan menunjukkan adanya perbedaan itu. Masyarakat memandang masalah keamanan dan ketertiban harus diutamakan agar mereka bisa beraktivitas secara normal, agar mampu menjalankan usahanya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun tampaknya para elit mengabaikannya.

Selain itu, pada tataran elit sendiri muncul manuver yang secara langsung maupun tidak langsung ingin menarik kembali TNI ke dalam kancah politik praktis. Rencana penggunaan kekuatan militer untuk segera meredam pergolakan di daerah, dilibatkannya para petinggi militer dalam "politik sarapan pagi" yang dilakukan oleh Presiden sebetulnya sudah memberi sinyal agar TNI "kembali masuk" ke arena politik praktis. Namun TNI tampak enggan memanfaatkannya. Mengapa? *Pertama*, keterlibatan TNI dalam politik praktis selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru, menghasilkan hujan yang luar biasa dari masyarakat. Periode awal dari gerakan reformasi 1998 merupakan periode suram yang akan

² Dalam tulisan ini elit disetarakan dengan pemimpin, sebab mereka adalah sekelompok kecil orang yang berada dipucuk struktur piramidal kekuasaan dalam satu masyarakat yang berpengaruh dalam hal menentukan alokasi sumberdaya yang ada, serta menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh warga masyarakat

dicatat dalam sejarah TNI maupun sejarah nasional Indonesia. Belum pernah dalam sejarah hidupnya TNI dihujaat oleh rakyatnya sendiri secara amat menyakitkan. Tentu saja TNI tidak ingin terperosok dua kali kedalam lubang yang sama. *Kedua*, TNI sudah mencanangkan paradigma baru yang mengikat dirinya sendiri untuk tidak terlibat dalam politik praktis.

Bila dicermati memang paradigma baru TNI ini tidak 100% menjamin TNI akan benar-benar menjauhi politik praktis. Prinsip "posisi tidak selalu di depan" maupun "*sharing power*" mengisyaratkan bahwa bila dikehendaki rakyat, bila diperlukan untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bisa saja TNI melibatkan diri kembali ke dalam kancah politik.

Disinilah letak paradox kedua itu. Para tokoh reformasi berhasil mengeluarkan TNI dari arena politik praktis. Namun pertikaian di antara mereka justru menciptakan situasi yang memungkinkan TNI kembali ke panggung politik. Muncul semacam kehendak tidak langsung dari para elit politik yang bertikai untuk menarik TNI masuk ke politik lagi. Ini sebuah ironi, sebab terjadi tatkala TNI menunjukkan kesungguhannya untuk mengimplementasikan paradigma barunya.

Bila demikian, peran apa yang bisa dimainkan oleh TNI bersama paradigma barunya untuk bersama kekuatan politik lainnya mewujudkan kehidupan politik yang demokratis di Indonesia? Dari demikian banyak kemungkinan yang ada, tulisan ini hanya memfokuskan diri pada persoalan bagaimana TNI membantu bangsa ini menemukan pemimpin yang karakternya diperlukan oleh masyarakat, yang memiliki visi dan tujuan yang dapat difahami oleh masyarakatnya.

Demokrasi dan Demokratisasi

Sebagai konsep politik, demokrasi menunjuk pada satu kehidupan politik dimana tiap warga negara menikmati hak,

³ Unsur penting dari paradigma baru TNI adalah: posisi tidak selalu di depan; pendekatan tidak langsung; mengubah posisi dari menduduki menjadi mempengaruhi; dan *sharing power* dengan aktor politik lain. Lihat *ABRI Abad XXI: Redefinisi, Reposisi, dan Reaktualisasi Peran ABRI Dalam Kehidupan Bangsa*, Jakarta: MABES ABRI, 1999

kewajiban dan kesempatan yang sama (*equal opportunity*), tiap warga negara memiliki kemandirian untuk memutuskan sesuatu (*autonomous decision or independency*), tiap warga negara mampu mengambil keputusan yang paling rasional untuk kepentingannya (*rational choice*), adanya sistem pengambilan keputusan yang transparan (*transparency*), dan tiap keputusan diambil dengan memperhatikan kehendak orang terbanyak (*majority*). Keadaan seperti ini hanya bisa dicapai dan dipelihara apabila sebelas soko guru demokrasi politik ditegakkan. Ke-sebelas soko guru itu adalah:

1. (Pengakuan terhadap) kedaulatan rakyat.
2. Pemerintahan (dibentuk) berdasarkan persetujuan dari yang diperintah.
3. (Dikenalnya prinsip) kekuasaan mayoritas.
4. (Diakuinya) hak-hak minoritas.
5. (Adanya) jaminan (terhadap) hak-hak azasi manusia.
6. (Adanya) pemilihan (umum) yang bebas dan jujur.
7. (Diakui dan dilaksanakannya prinsip) persamaan di depan hukum.
8. (Jaminan terhadap) proses hukum yang wajar.
9. Pembatasan pemerintah secara konstitusional.
10. (Diakuinya) pluralisme sosial, ekonomi, dan politik.
11. (Adanya) nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama dan mufakat.

Adapun demokratisasi adalah proses perubahan dari struktur dan tatanan pemerintahan yang otoriter ke arah struktur dan tatanan yang demokratis dimana setiap keputusan dibahas (didiskusikan) bersama dan pelaksanaan keputusan itu didelegasikan kepada beberapa orang atau institusi politik. Demokratisasi merupakan proses dilakukannya diversifikasi kekuasaan untuk meniadakan kesenjangan hak-hak politik warga negara serta memperluas hak warga negara untuk bersuara dan berpendapat. Penekanan terhadap "diversifikasi kekuasaan" inilah yang sering dipertentangkan dengan struktur

⁴ Dikutip dari *What Is Democracy?*, United States Information Agency, Oktober 1991. Kata-kata dalam tanda kurung merupakan tambahan dari penulis untuk menegaskan makna yang berusaha disampaikan.

komando yang sentralistis dalam dunia militer, sehingga hadirnya militer dalam dunia politik dipandang sebagai unsur pengganggu hadirnya kehidupan yang demokratis. Padahal diversifikasi kekuasaan merupakan produk yang tak terhindari dari bekerjanya hubungan linier dan saling berpengaruh dari *development, liberalization, and pluralization*.⁵

Apakah benar kehadiran militer dalam proses demokratisasi secara mutlak menutup kemungkinan munculnya kehidupan politik yang demokratis? Pertanyaan ini penting, sebab menurut O'Donnell, Schmitter dan Whitehead⁶ ada lima kemungkinan yang dihasilkan oleh demokratisasi, yakni: (1) Restorasi sistem politik otoriter kedalam bentuk baru, (2) Revolusi sosial sebagai akibat menajamnya konflik kepentingan dalam masyarakat, (3) Liberalisasi sistem otoriter oleh penguasa pasca totalitarian untuk mendapatkan dukungan politik dan mengurangi tekanan dari masyarakat, (4) Penyempitan proses demokrasi dari sistem liberal ke demokrasi limitatif, (5) Sistem dan pemerintahan yang demokratis.

Demokratisasi tidak mutlak akan menghasilkan sistem pemerintahan yang demokratis. Penyebabnya bisa karena kembalinya dominasi militer dalam kehidupan sosial-politik. Atau bisa juga dengan terlampauinya batas kesabaran masyarakat akan situasi konflik yang berkembang terutama di kalangan elit, yang menyebabkan mereka tidak lagi percaya dengan norma dan institusi politik yang ada, sedemokratis apapun norma dan institusi itu. Dengan kata lain, tingkat probabilitas demokratisasi menghasilkan kehidupan politik yang demokratis sangat tergantung pada upaya penegakan hukum.

Dengan menggunakan kasus Spanyol sepeninggal Jenderal Franco, Aguero menemukan bahwa kehadiran militer tidak selalu berdampak buruk terhadap upaya membangun kehidupan yang demokratis. Dalam situasi anomali yang menjadi ciri utama masyarakat yang sedang mengalami proses transformasi dari rejim otoritarian ke rejim yang demokratis, kehadiran militer dibutuhkan

⁵ Felipe Aguero, *Soldiers, Civilians, and Democracy* (Baltimore, Maryland: The John Hopkins University Press, 1995) pp. 8, 44.

⁶ Guillermo O'Donnell, Philippe C. Schmitter, dan Laurence Whitehead, *Transitions from Authoritarian Rule*, (Baltimore, Maryland: The John Hopkins University Press, 1986) pp. 8-10.

sebatas membantu warga negara menegakkan kembali peraturan sosial (*social order*) dan kepatuhan sosial (*social obedience*). Tentu tidak ada jaminan 100% bahwa setelah *order and obedience* berhasil direkonstruksi militer akan dengan sukarela keluar dari politik. Untuk menghindari hal ini, selain adanya *political will* dari petinggi militer, peran militer harus secara rinci dan definitif dirumuskan kedalam satu Undang-undang.⁷

Untuk kasus Indonesia, jaminan itu bisa diberikan sepanjang kita memandang paradigma baru TNI hanya sebagai bagian dari paradigma besar nasional. Tidak seperti di era pemerintahan Soeharto, dimana paradigma TNI superior terhadap paradigma kelompok sosial dan politik lainnya, di era reformasi ini harus muncul kesadaran masyarakat bahwa paradigma TNI berposisi sejajar dengan paradigma-paradigma yang lain. Misalnya, dimensi tidak menduduki tapi sebatas mempengaruhi, tampaknya sejalan dengan prinsip *steering rather than rowing* dalam konsep *Reinventing Government*. Dimensi posisi tidak selalu di depan, tampak sejalan dengan paradigma pembangunan yang lebih menekankan *empowering* dengan mengedepankan mekanisme *bottom-up* daripada *top-down*. Artinya, dengan mengkaitkan paradigma TNI dengan paradigma lain yang ada dalam masyarakat, maka ada tali pengikat yang sangat kuat yang mampu menahan TNI untuk tidak berperan "seperti dulu" lagi.

Persoalannya sekarang adalah mencari pemimpin yang visioner, yang mampu meramu keseluruhan paradigma yang ada (termasuk paradigma baru TNI) menjadi sebuah paradigma nasional. Sebenarnya para elit yang menjadi lokomotif reformasi di Indonesia mampu melakukannya. Sayang mereka terjebak kedalam perjuangan politik praktis, hingga membuang demikian banyak energi untuk pemecahan masalah bangsa berjangka pendek daripada masalah yang berjangka panjang.

⁷ Juan Linz dan Alfred Stepan, *Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe* (Baltimore, Maryland: The John Hopkins University Press, 1996) p. 65.

⁸ David Osborne dan Ted Gaebler, *Reinventing Government: How the Spirit is Transforming the Public Sector* (New York, Plume, 1993).

Fakta Politik Indonesia di Era Reformasi

Kita sepakat bahwa reformasi 1998 telah melahirkan eforia politik yang sangat dahsyat. Eforia tersebut nyaris membuat reformasi kehilangan makna, sebab perubahan yang sifatnya evolutif diubah menjadi revolutif. Akibatnya terjadi disorientasi sosial yang cukup parah. Norma-norma dan pranata sosial yang lama ditinggalkan, sementara yang baru belum mapan, belum sepenuhnya terbentuk. Menghadapi ketidakpastian, masyarakat kembali kepada norma-norma kelompok yang mereka fahami. Susahnya gejala ini distimulir oleh Presiden Abdurrahman Wahid yang dalam berbagai kesempatan menyatakan "Biar masyarakat menyelesaikan masalah dengan cara mereka sendiri." Produknya dapat dilihat dari kasus kerusakan etnis, terutama yang terjadi di Sambas (Kalimantan Barat) maupun Maluku. Masyarakat Dayak menyelesaikan konfliknya dengan warga pendatang (khususnya etnis Madura) dengan cara mengayau kepala, karena memang itulah cara yang mereka kenal. Produk yang sama kita saksikan tatkala isu santet merebak di wilayah Jawa Timur.

Bila diingat bahwa "bangsa Indonesia" merupakan bentukan baru dari "bangsa-bangsa lama" yang terbentuk karena kesamaan etnis (*ethno-nationalism*), maka disamping menumbuhkan kembali semangat ethnosentris, eforia politik juga menyulitkan kita untuk mulai menyadari adanya kesamaan disamping perbedaan yang ada diantara kita. Ini terlihat dari klaim beberapa daerah terhadap kepemilikan maupun ciri khas daerah dalam kaitannya dengan otonomi daerah berdasarkan UU nomer 22/1999. Perbedaan lebih ditonjolkan daripada semangat kebersamaan, yang terlihat dari lahirnya beberapa Propinsi dan Kabupaten selama era reformasi. Bila klaim yang dilakukan hanya sebatas mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, dampak positifnya masih bisa ditonjolkan. Namun klaim yang dilakukan tampaknya lebih mengedepankan penonjolan etnisitas dan kepemilikan sumber daya alam yang ada di daerah itu. Kehendak kita untuk mengokohkan persatuan Indonesia atas dasar keragaman yang ada, justru terancam oleh munculnya egoisme daerah.

Reformasi 1998 juga menghendaki menguatnya *civil society*. Sayangnya, sejauh ini banyak elemen maupun kelompok dalam masyarakat yang memaknakan *civil society* sebagai menghilangkan peran negara dalam kehidupan masyarakat. *Civil society* bertujuan mensejajarkan posisi tawar-menawar antara warga negara dengan negara, sehingga hubungan yang tercipta bersifat konsultatif, bukan konfrontatif. *Civil society* berusaha mewujudkan prinsip kehidupan *homo homini salus*. Namun eforia politik yang menggugah semangat *ethnocentrism*, disorientasi nilai, dan pemimpin yang lemah, telah memicu anarkisme di kalangan masyarakat, membuat *homo homini salus* berubah menjadi *homo homini lupus*.

Gejala *homo homini lupus* ini dengan mudah mewabah sebab militerisme merupakan bagian dari kultur politik bangsa Indonesia.⁹ Hal ini bisa dilihat dari sejarah politik Indonesia sejak masa kerajaan sampai masa modern. Di masa kerajaan masih berdiri kekuasaan Raja sarat dengan nuansa *renumeratif* dan *punitif* untuk mendapatkan dan memelihara kekuasaannya. Untuk keperluan itu, Raja harus merangkul kaum pedagang dan "militer." Dengan menggunakan model penjelasan politik yang manapun tentang politik Indonesia masa kini, sulit untuk menyangkal bahwa praktek politik semacam ini masih terus berlanjut. Bukankah kaum kelas menengah dari kalangan pedagang lebih mudah mendekat ke pusat kekuasaan daripada kaum kelas menengah dari kalangan pendidikan? Bukankah fakta menunjukkan bahwa "sayap militer" dipandang perlu untuk menjamin kelangsungan hidup sebuah partai politik? Secara empirik hal ini bisa dilihat dari penggunaan atribut dan cara-cara militer yang hingga dimasa reformasi ini masih digunakan oleh "satuan pengaman" partai-partai politik.

Andai saja personifikasi institusi sebagai akibat dari kuatnya pandangan tentang kekuasaan yang bersifat *centripetal* (memusat) bisa diakhiri, mungkin gejala menguatnya *homo homini lupus* dalam politik Indonesia bisa dicegah. Masalahnya para elit tampaknya

⁹ Militerisme disini menunjuk kepada ciri, bukan orang ataupun institusi. Ada dua ciri utama dari sifat militeristik. Pertama, kecenderungan bertindak represif lebih besar dibandingkan persuasif. Kedua, lebih mengutamakan hubungan yang bersifat hirarkial (sistem komando) daripada hubungan yang egalitarian.

benar-benar menikmati manfaat personifikasi institusi ini. Sebab konsep ini akan mudah menggaling dukungan massa melalui cara mobilisasi dan disinformasi, dimana kepentingan elit dengan mudah ditransfer sebagai kepentingan kelompok atau institusi. Keinginan kita untuk membangun masyarakat Indonesia baru yang demokratis, yang salah satu nilainya adalah *rational choice*, tampaknya masih sebatas imajinasi selama personifikasi institusi ini tidak segera diakhiri.

Kebutuhan Kita

Menghadapi situasi yang digambarkan di atas, saat ini kita tidak sekedar membutuhkan pemimpin yang mampu membawa bangsa Indonesia segera keluar dari krisis multidimensi, lebih dari itu diperlukan perubahan atau penyesuaian gaya memimpin (kepemimpinan) yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Bila mengacu kepada pengalaman sejarah di awal kemerdekaan yang melahirkan negarawan besar seperti Bung Karno, Bung Hatta, Sutan Syahrir dan sebagainya, beberapa faktor berikut memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi kematangan pribadi maupun pengembangan visi kebangsaan mereka: *Pertama*, mereka "berkesempatan" untuk melihat Nusantara, berinteraksi secara langsung dengan rakyat sekalipun dalam status resmi "orang buangan." *Kedua*, mereka bersedia bekerjasama, saling mengisi berdasarkan kekuatan dan kekurangan yang dimiliki. *Ketiga*, mereka berhadapan dengan musuh bersama yang riil, yang memudahkan mereka untuk menyatukan visi dan misi bersama walaupun keasadaran akan perbedaan pandangan tetap ada dan dihormati.

Ironisnya ketika Indonesia telah merdeka, telah berada di seberang jembatan emas, warga negaranya justru sulit untuk saling mengunjungi. Pola kerja yang menyebabkan seseorang bekerja hingga pensiun di satu tempat, menyulitkan para calon pemimpin untuk melihat realita sosial politik di luar lingkungannya. Berubahnya musuh dari sesuatu yang kongkret, misalnya penjajah Belanda, serta masih tingginya orientasi bekerja di sektor pemerintahan, membuat hubungan sosial yang bersifat komparatif berubah menjadi kompetisi. Bahkan, khusus dalam hubungan antara sipil-militer, suasana

kooperatif yang digambarkan terjalin dimasa revolusi fisik, kini telah berubah menjadi kooptasi atau konfrontasi. Dengan karakteristik seperti ini, maka bisa difahami bila rasa saling percaya antar warga masyarakat akan mudah runtuh.

Berdasarkan sketsa di atas maka kedepan, dalam arti upaya penyelamatan gerakan reformasi agar tidak kembali menghasilkan rejim otoriter seperti yang dikhawatirkan oleh O'Donnell, Schmitter dan Whitehead, setidaknya empat hal berikut menjadi agenda utama politik kita.

Pertama, proses politik yang berlangsung harus mampu menghadirkan pemimpin yang demokratis namun tidak kehilangan kemampuannya untuk bertindak *decisive*. Kemampuan ini diperlukan agar dialog yang umum terjadi dalam sebuah proses pengambilan keputusan yang demokratis tidak kehilangan fokus atau bahkan momentum untuk bertindak. Ini tidak berarti bahwa kita mencari orang yang tidak mau mendengar pendapat orang lain. Ini hanya mengingatkan bahwa kita membutuhkan orang yang secara kuantitatif mendapat dukungan luas dari masyarakat, dan secara kualitatif memiliki kemampuan yang memadai untuk mengelola konflik kepentingan yang ada dalam masyarakat sehingga energi negatif dari konflik itu dapat berubah menjadi energi positif bagi kebutuhan mendinamisir kehidupan bernegara.

Kedua, merangkai rasa saling percaya antar warga masyarakat yang saat ini berada pada titik nadir yang mengkhawatirkan. Tidak ada manfaatnya menciptakan aroma keterbukaan, bila hubungan sosial pada tataran masyarakat diselimuti oleh *ingroup-feeling* yang kokoh, yang memunculkan rasa saling curiga di antara mereka. Bila dikaitkan dengan konstelasi politik saat ini, maka persoalan terbesar bangsa Indonesia adalah bukan pada menurunkan atau menaikkan seseorang menjadi Presiden. Lebih rumit lagi persoalan merangkai kembali rasa saling percaya diantara warga masyarakat sebagai landasan dibangunnya masyarakat politik yang demokratis. Membangun kembali semangat nasionalisme, semangat berani berkorban demi bangsa dan negara Indonesia, tampaknya lebih sulit dilakukan dibandingkan dengan saat Bung Karno dan Bung Hatta melakukannya lebih dari separuh abad lalu.

Ketiga, segera membangun mekanisme dan institusionalisasi politik yang secara efektif dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik kepentingan yang muncul. Keributan politik yang muncul pada tataran parlemen (DPR dan MPR) maupun pada tataran masyarakat (demonstrasi) memberi pesan bahwa kita belum berhasil membangun mekanisme penyelesaian konflik yang bersifat institusional. Bila dilihat dari sudut Ilmu Politik, khususnya yang berhubungan dengan kehidupan kepartaian, maka dapat dikatakan Pemilu 1999 tidak seutuhnya dapat dikatakan sukses. Pemilu 1999 bisa secara utuh dikatakan sukses bila segala konflik kepentingan pada tataran masyarakat tidak mencuat keluar secara spontan dan sporadis, sebab konflik itu sudah dibawa wakil-wakil mereka untuk diperjuangkan pada tataran sistem politik. Intensitas unjuk rasa yang demikian tinggi mengisyaratkan bahwa partai politik atau para wakil rakyat belum sepenuhnya dapat menyerap dan menyalurkan kepentingan rakyatnya.

Keempat, membangun pola rekrutmen yang memungkinkan setiap warga negara muncul darimana saja, misalnya dari daerah, tanpa harus melakukan gebrakan yang spektakuler di Jakarta. Cornelis Lay mensinyalir bahwa rekrutmen elit politik di masa Orde Baru kental diwarnai dengan nuansa "Kasta Biru." Maksudnya pola rekrutmen dimana legitimasi dan kelayakan politik dinilai dari hubungan darah ataupun kedekatan fisik dengan pengurus partai.¹⁰ Mengamati mekanisme penentuan wakil rakyat yang digunakan dalam Pemilu 1999 lalu, sulit dipungkiri bahwa rekrutmen "Kasta Biru" ini masih berlanjut. Pola ini jelas tidak sesuai dengan nilai dasar kehidupan politik yang demokratis, sebab pola ini mengabaikan prinsip transparansi dan egalitarianisme yang memungkinkan setiap warga negara Indonesia berkesempatan untuk menjadi pemimpin.

Peran TNI.

Berhadapan dengan situasi sosial, politik dan keamanan seperti digambarkan di atas, apa yang harus dilakukan oleh TNI dalam

kerangka paradigma barunya? Apalagi TNI tidak sekedar bertekad melakukan perubahan pada tataran paradigma, juga perubahan dalam hal doktrin, struktur, pendidikan, hukum, moral dan kepemimpinan. Untuk itu, secara tampilan (operasional) ciri paradigma TNI adalah: secara bertahap meninggalkan medan sosial-politik praktis, dan memusatkan perhatian pada tugas pertahanan negara, utamanya ancaman dari luar.¹¹

Dalam bingkai seperti ini, maka TNI dituntut untuk membuka diri agar dapat secara leluasa melakukan tukar-menukar pikiran, *exchange ideas* dengan kelompok masyarakat potensial (maksudnya berpotensi menjadi elit atau pemimpin bangsa di kelak kemudian hari) seperti para *civitas academica*. Idealnya *exchange ideas* ini dilakukan sejak para calon perwira masih dalam pendidikan (AMN, AAU atau AAL). Namun kendala yang segera menyergap ide ini adalah di pihak taruna mereka masih berada dalam fase "siap komandan," artinya masih pada taraf mematuhi perintah; sedangkan di pihak *civitas academica* akan dituding mempraktekkan militerisasi kampus. Ide TNI membuka diri ini dapat dilaksanakan apabila tumbuh kesadaran pada diri warga masyarakat bahwa menjadi tentara hanyalah sebuah pilihan pekerjaan, dan warga TNI tidak merasa menjadi warga negara kelas satu seperti yang selama ini dirasakan oleh masyarakat.

Pembukaan diri TNI ini berhubungan dengan kebutuhan masyarakat akan adanya kekuatan sosial atau politik yang dapat berperan efektif sebagai mediator konflik kepentingan yang potensial muncul dalam masyarakat. TNI memang harus keluar dari politik praktis, sebab didalam politik praktis dikenal adanya pemihakan. Sementara secara paradoksial TNI bertekad untuk bersikap netral. Sangat tidak mungkin TNI bersikap netral dalam dunia politik praktis. Disinilah peran paradigma baru TNI berbicara. Dengan pengaruhnya, TNI diharapkan dapat mengendalikan para politisi yang membawa kepentingan saling berbeda, setidaknya menyadarkan mereka untuk lebih melihat persamaan yang ada daripada perbedaan di antara mereka.

Terakhir, sejalan dengan kebutuhan lahirnya pemimpin yang benar-benar datang dari akar rumput politik, dengan jaringan

¹⁰ Cornelis Lay, 'Rekrutmen Elit Politik,' *PRISMA*, Jakarta: LP3ES, nomer 4, tahun 1997, halaman 24.

¹¹ Ibid., halaman 95

organisasinya yang sudah jadi dan solid, TNI dapat membantu bangsa brilian muncul sebagai pemimpin. Tentu tidak kita kehendaki TNI mendiktekan kehendak dan kepentingannya kedalam arena itu. Arena itu adalah "ruang publik" yang bisa dimanfaatkan oleh warga negara. Tugas TNI adalah menjaga ruang publik itu, sebab ciri independensi dan otonom dari kelompok-kelompok *civil society* berpotensi membuat arena itu rubuh dan mubazir.

Sejauh ini arena itu hanya ada di Jakarta. Sepintar apapun, sebijaksana apapun, memiliki visi dan misi yang sebenarnya dibutuhkan oleh bangsa Indonesia, namun bila seseorang tidak mampu datang ke Jakarta, tidak mampu tampil di media massa, di corong radio maupun di depan kamera televisi, hampir mustahil dia akan muncul sebagai pemimpin bangsa ini. Pemindahan arena harus segera dilakukan, yang sebenarnya menjadi kewajiban dari partai politik. Namun melihat kondisi kepartaian di Indonesia yang masih memprihatinkan, tidak ada salahnya dengan bingkai paradigma barunya disertai kesadaran bahwa paradigma itu hanya elemen dari sebuah super-paradigma bagi bangsa Indonesia, TNI memelopori kampanye memunculkan pemimpin dari daerah ini.***

Daftar Pustaka

- ABRI Abad XXI: Redefinisi, Reposisi, dan Reaktualisasi Peran ABRI Dalam Kehidupan Bangsa*, Jakarta: MABES ABRI, 1999.
- Almanak Partai Politik Indonesia* (API), 1999.
- Aguero, Felipe (1995) *Soldiers, Civilians, and Democracy*. Baltimore, Maryland: The John Hopkins University Press.
- Lay, Cornelis (1997). 'Rekrutmen Elit Politik.' *Prisma* Nomor 4.
- Linz, Juan dan Stepan, Alfred (1996). *Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe* Baltimore, Maryland: The John Hopkins University Press.
- O'Donnell, Guillermo, Philippe C. Schmitter, dan Laurence Whitehead, (1986) *Transitions from Authoritarian Rule*, Baltimore, Maryland: The John Hopkins University Press.
- David Osborne dan Ted Gaebler (1993) *Reinventing Government: How the Spirit is Transforming the Public Sector*, New York: Plume.
- United States Information Agency, (1991) *What Is Democracy?*, Oktober 1991